

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A. Sholihul, *Undang-Undang Agraria Dan Pendaftaran Tanah*, Rona Publishing, Yogyakarta.
- A.P. Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Baru, Bandung, 1998.
- Abdurrahman, *Ketentuan- Ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan, Seri Hukum Agraria III*, Alumni, Bandung, 1979.
- Anominous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, ALUMNI, Bandung, 1983.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Tentang Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Dinda Keumala-Setiyono, *Tanah dan Bangunan*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Effendi Parangin, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Erlis Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- H. Ali Achmad Chomzah, *penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Instansi Pemerintahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003
- K. Wantjik Saleh, , *Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1995
- Muhammad Machfudh Zarqoni, *Hak Atas Tanah*, prestasi Pustaka, Jakarta 2015.

Muhammad Yamin Lubis, Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Baru, Bandung, 2018.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.

Rusman Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991

Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disertasi*, Erlangga, Jakarta, 2013.

Umar Dani, *Putusan Pengadilan Non-Executable (Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN)*. Jakarta: Genta Press

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi Pemerintah.

C. Sumber lain

Jurnal Hukum, *Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra
Langsa, Aceh, 2017.

<https://kbbi.web.id/sertifikat/> didownload pada tanggal 04 Juli 2018.